

KAJIAN PENYUSUNAN PEDOMAN PEMULIHAN FUNGSI PEMERINTAHAN



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**



**2010
LEMBAGA KEMITRAAN PEMBANGUNAN SOSIAL
(LKPS)**

Latar Belakang



- Sejumlah peraturan negara mengamanatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif:
 - UU No. 24 /2007 tentang Penanggulangan
 - PP No.21 /2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - PP No.23 /2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Pemerintah memiliki fungsi sentral dalam pelayanan & pengelolaan kepentingan publik, khususnya dalam situasi bencana
- Praktek otonomi daerah, menempatkan pemerintahan di daerah sebagai ujung tombak tata kelola penanggulangan bencana

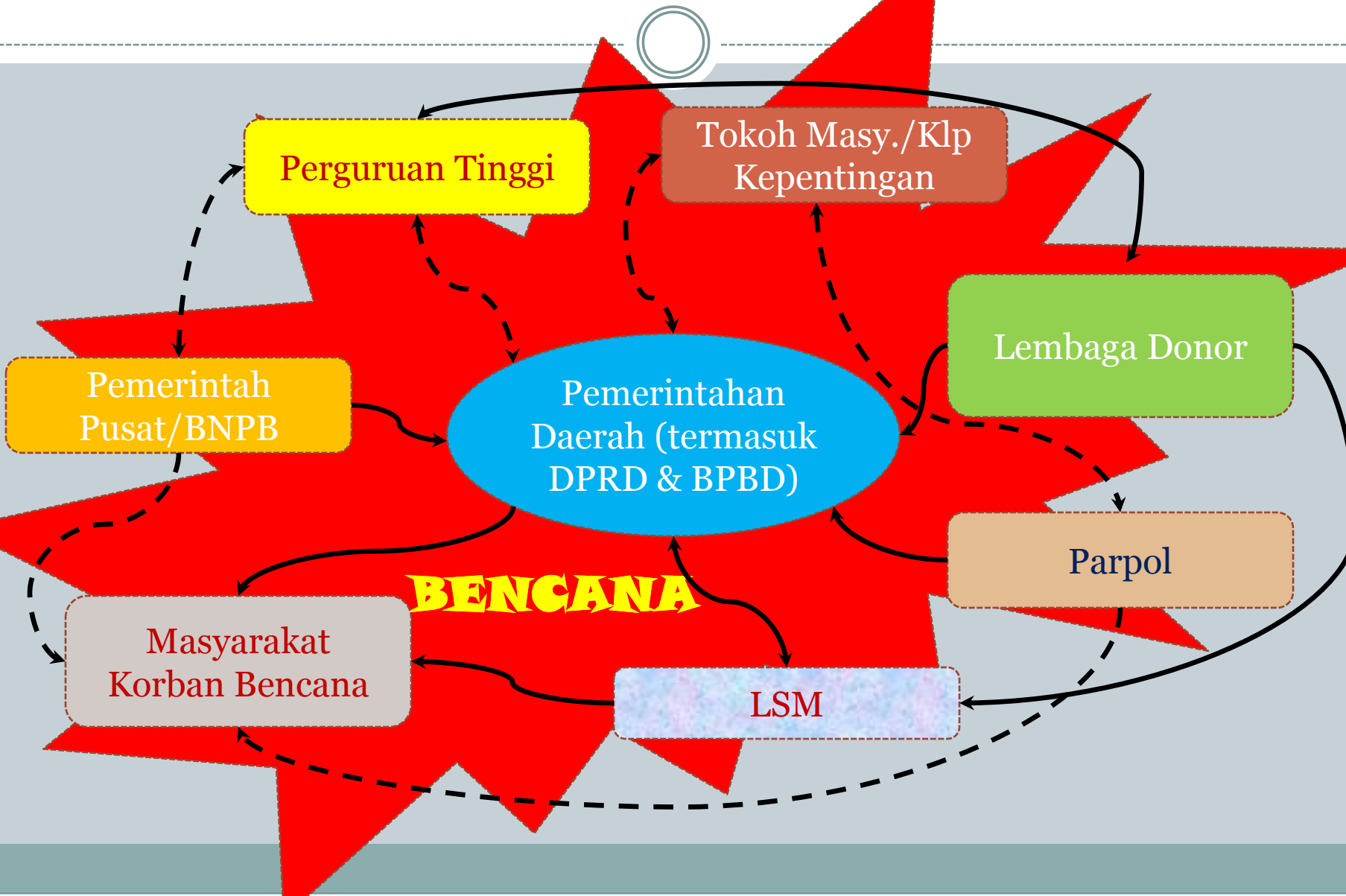
Permasalahan



Bagaimana peran pemerintahan daerah dapat kembali berfungsi secara optimal dalam situasi pasca bencana, agar kondisi kehidupan masyarakat luas yang juga terkena dampak bencana dapat terbantu melalui tata kelola dan kewenangan yang jelas



Peran Sentral Pemerintahan Daerah dalam Situasi Bencana



Maksud Kajian



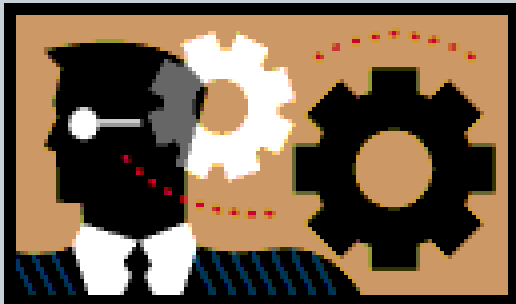
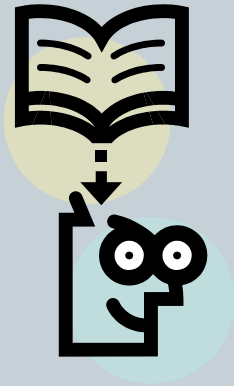
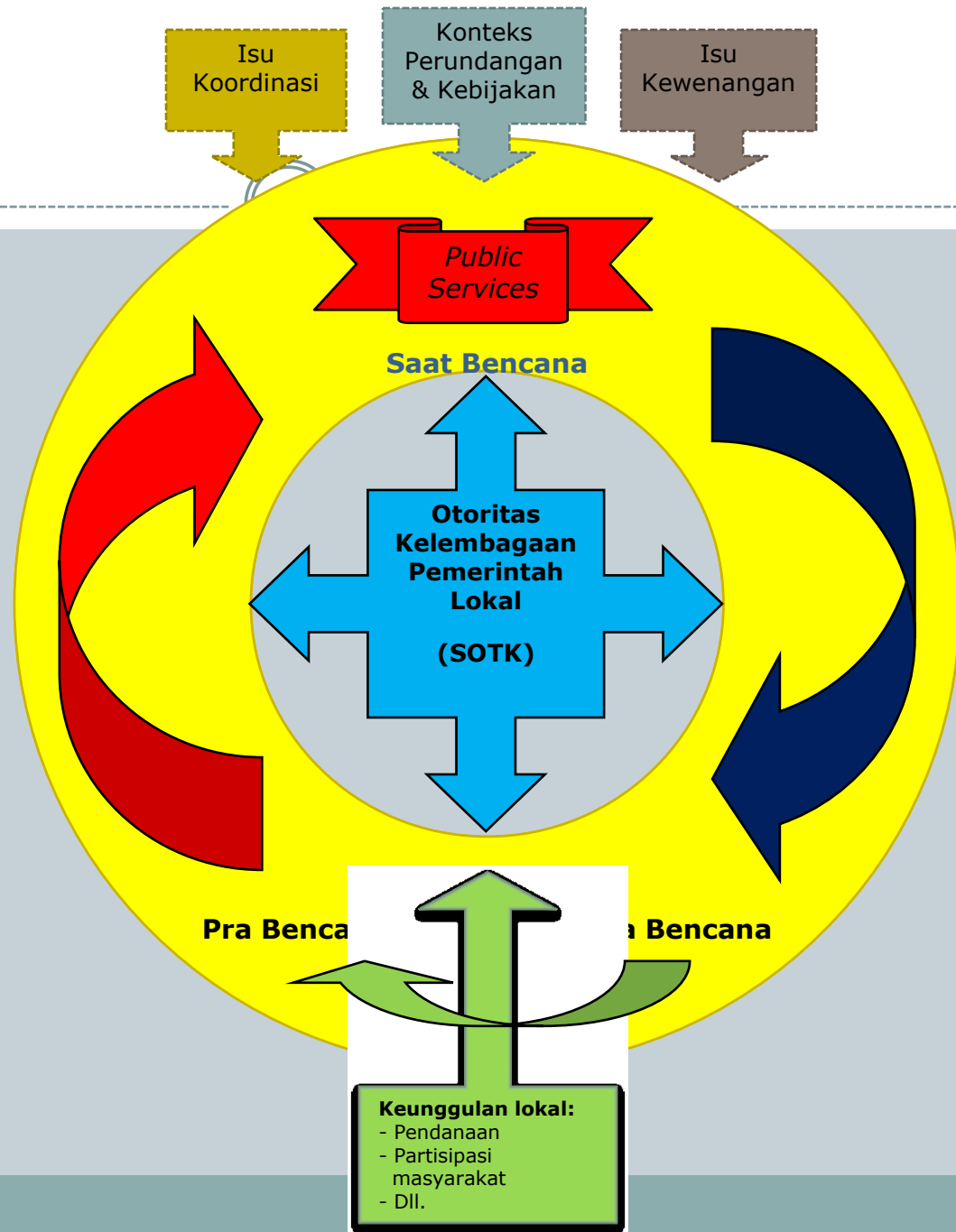
Mencari rumusan pemulihan fungsi pemerintahan dalam upaya tercapainya suatu penanganan dampak bencana dengan pelebagaan pemerintah lokal sesuai dengan kewenangannya dalam mengurus pemerintahan di tingkat lokal untuk memberikan *public services* secara cepat, terencana dan terkoordinasi

Tujuan

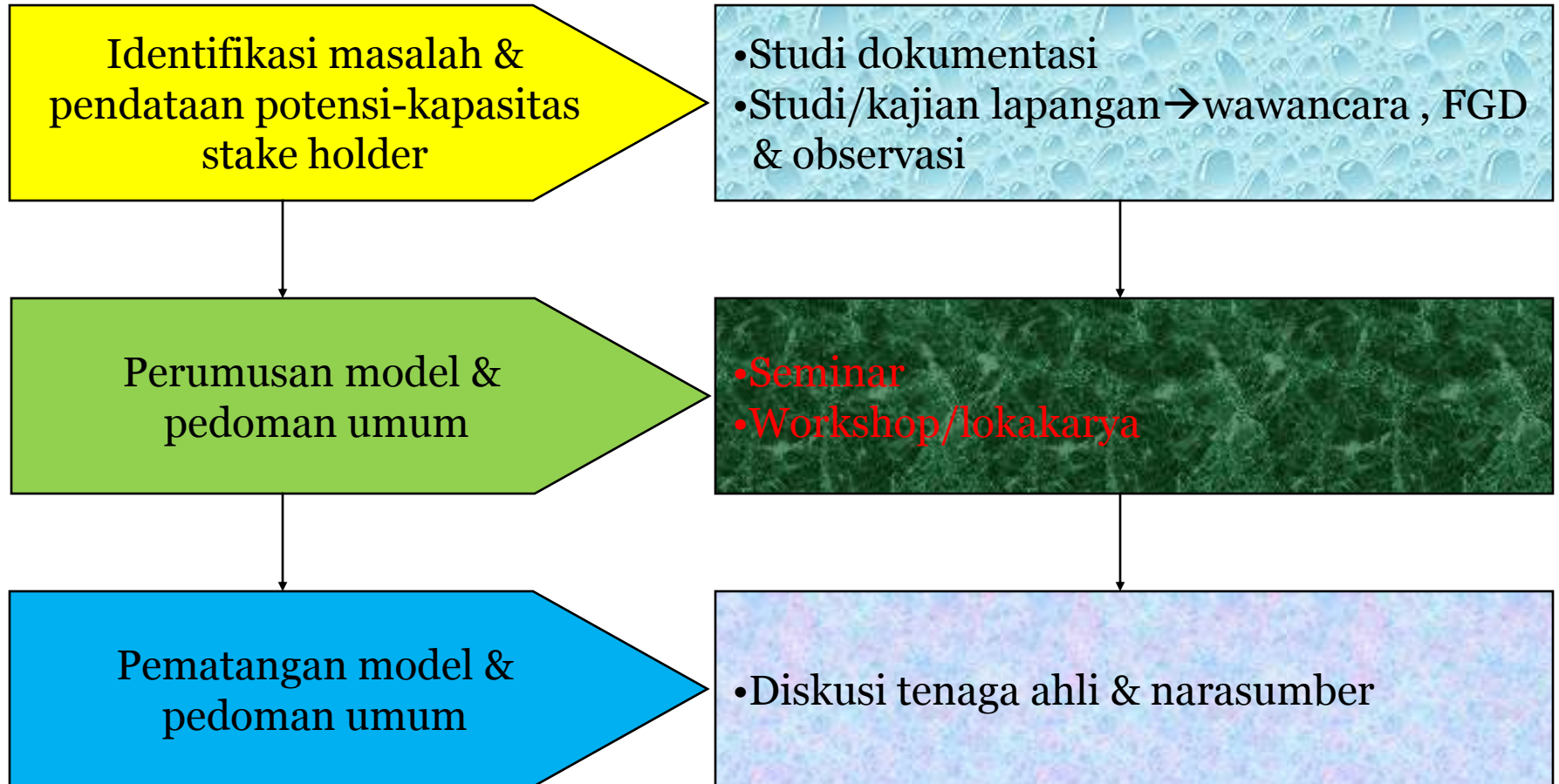


- Memetakan dan menganalisis mekanisme lembaga pemerintahan lokal dalam mengintegrasikan tugas dan wewenang dalam situasi bencana, pra bencana dan pasca bencana.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menguatkan kelembagaan pemerintah lokal dalam penanganan bencana dengan cepat, tepat pada masyarakat.
- Menyusun pedoman pemulihan fungsi pemerintahan daerah dalam situasi bencana agar dapat segera menjalankan peran strategisnya sebagai konteks penanggulangan bencana dan juga penyelenggara pelayanan publik.

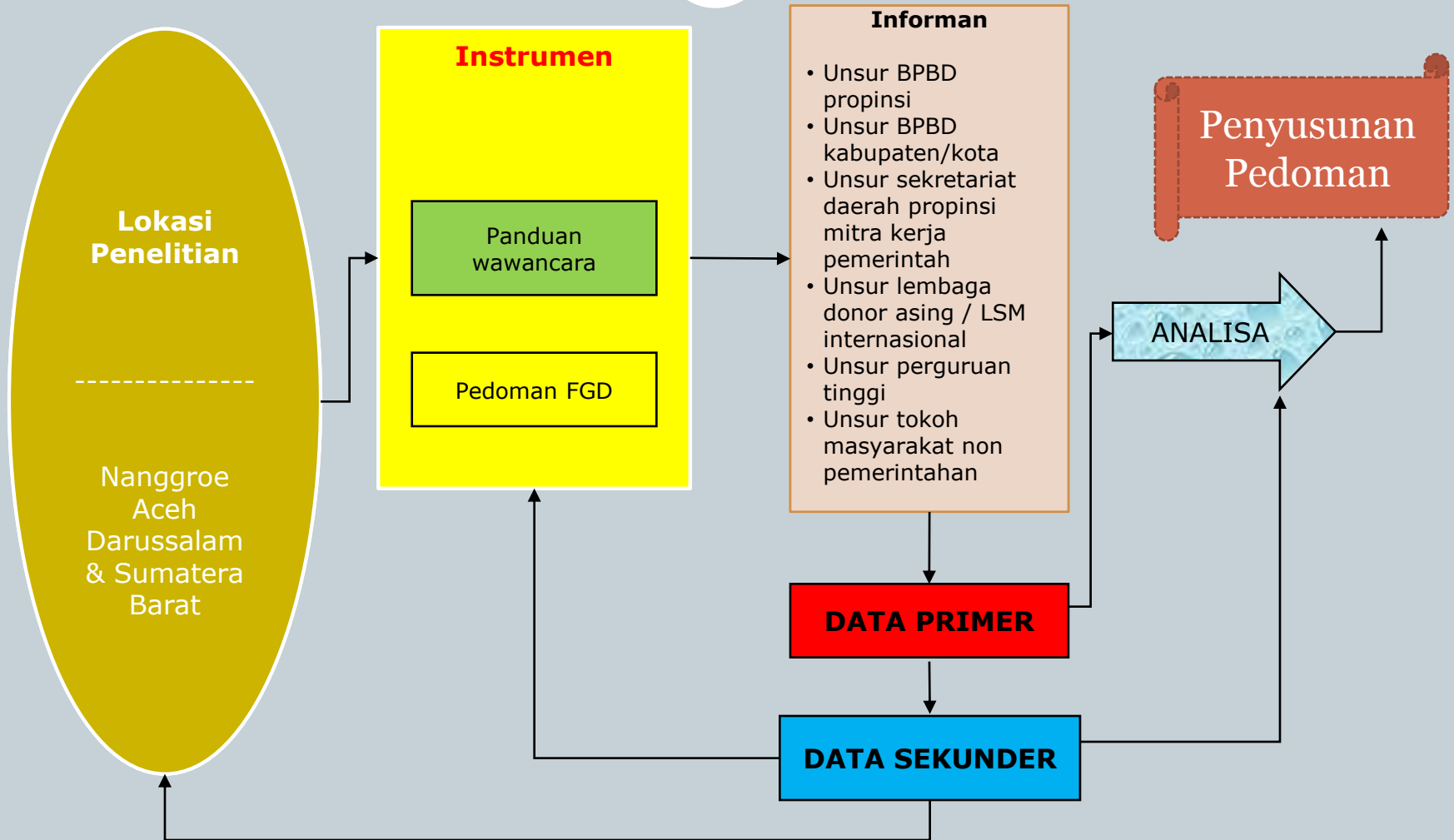
Kerangka Pemikiran



Tahap Kegiatan



Skema Metodologi



Teknik Pengumpulan Data



Kategori Informan	Wawancara mendalam	FGD kelompok 1	FGD kelompok 2
Unsur BPBD provinsi	X	X	
Unsur BPBD kabupaten/kota		X	
Unsur sekretariat daerah provinsi		X	
Unsur LSM	X		X
Unsur lembaga donor asing	X		X
Unsur perguruan tinggi			X
Unsur tokoh masyarakat	X		

Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Lokasi	Bulan 01				Bulan 02				Bulan 03				Bulan 04			
			01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
01.	Persiapan:																	
a.	Koordinasi Internal.	Jakarta																
b.	Pemantapan Metoda & Rencana Kerja.																	
c.	Koordinasi dengan Unit Teknis																	
d.	Penetapan jenis, kualitas & Instrumen untuk pengumpulan data/ informasi.																	
e.	Penetapan substansi dan Outline / Kerangka penulisan Pedoman																	
f.	Penyusunan dan penyerahan Laporan Pendahuluan.																	
02.	Pengumpulan data:																	
a.	Koordinasi Internal	Jakarta																
b.	Pelaksanaan pengumpulan Data/ Informasi.																	
c.	Klarifikasi Data																	
d.	Review & Analisis Data																	
e.	Rekomendasi untuk pemantapan substansi & Kerangka isi Pedoman.																	
f.	Koordinasi dengan Unit Teknis BNPB.																	
03.	Penyusunan Pedoman:																	
a.	Penyusunan Draft Pedoman	Provinsi NAD & SUMBAR																
b.	Koordinasi dengan Unit Teknis BNPB untuk Draft Pedoman dan persiapan uji-lapangan.																	
c.	Pelaksanaan Uji-Lapangan																	
d.	Review Hasil Uji-Lapangan.																	
e.	Penyempurnaan Draft Pedoman.																	
f.	Penyusunan & Penyerahan Draft Laporan Akhir.																	
04.	Presentasi / Ekspose:																	
a.	Persiapan dan Koordinasi Internal	Jakarta																
b.	Koordinasi dengan Unit Teknis BNPB untuk penetapan jadwal pemaparan/ ekspose.																	
c.	Pelaksanaan Pemaparan/ Ekspose.																	
d.	Pendokumentasian Masukan & Evaluasi Draft Pedoman.																	
04.	Perbaikan pedoman																	
a.	Koordinasi Internal.	Jakarta																
b.	Penyusunan Perbaikan Draft Pedoman menjadi Pedoman.																	
c.	Koordinasi dengan Unit Teknis BNPB.																	
d.	Finalisasi Pedoman																	
e.	Penyerahan Pedoman kepada Unit Teknis BNPB.																	
f.	Penyusunan dan Penyerahan Pelaporan Akhir.																	

Kerangka Laporan Pendahuluan



BAB 1 : Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Permasalahan
- C. Maksud Kajian
- D. Tujuan Kajian
- E. Metodologi

BAB 2 : Penanggulangan Bencana dalam Kerangka Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah

- A. Manajemen bencana
- B. Mekanisme kelembagaan dalam manajemen bencana
- C. Otonomi daerah
- D. Kebijakan publik
- E. Kerangka pemikiran

BAB 3 : Gambaran Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia

- A. Definisi bencana
- B. Gambaran umum gempa bumi
- C. Gambaran umum tsunami

BAB 4 : Rencana Kegiatan

- A. Organisasi Pelaksanaan
- B. Jadwal Pelaksanaan

Terima Kasih

